

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

pada PERUSAHAAN

(Studi Kasus pada PT.NATURAL NUSANTARA)

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Manajemen,

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia



Oleh:

Nama : Dwi Puspitasari
Nomor Mahasiswa : 04311130
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 13 Mei 2008

Penulis,

Dwi Puspitasari

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

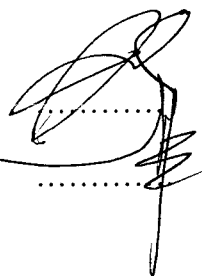
Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. NATURAL NUSANTARA)

Disusun Oleh: DWI PUSPITASARI
Nomor Mahasiswa: 04311130

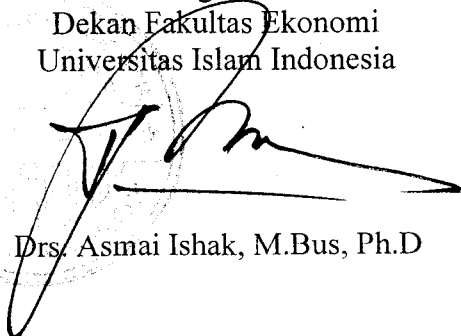
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 23 Juni 2008

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Abdul Moin, MBA

Penguji : Dra. Nurfauziah, MM



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah, atas berkah dan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan (PT.Nasa)”.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Di dalam penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari pihak yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikiran demi tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Abdul Mo'in,SE.,MBA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Asmai ishak M. Bus. Ph. D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
3. Bapak Hana selaku direktur pada PT. Nasa atas motivasi, pelajaran berharga dan bantuannya kepada penulis.
4. Bapak Joni dan Bapak Gunawan yang selalu bisa meluangkan waktunya, untuk kesempurnaan data yang diperoleh penulis
5. Papa, Mama ku terkasih, tersayang, tercinta. Terimakasih banyak buat semuanya. Doa, materi, Motivasi dan semuanya. Ade janji akan selau buat Papa, Mama bangga...Doain ya Pa, Ma. *I Love u all*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul Skripsi.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori.....	6
2.2.1 <i>Pengertian Good Corporate Governance</i>	6
2.2.2 <i>Latar Belakang Corporate Governance</i>	10

2.2.3	Maksud dan Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	11
2.2.4	Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	13
2.2.5	Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	15
2.2.6	Faktor Keberhasilan dan Kendala Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	18
2.2.7	Karakteristik Perusahaan dalam <i>Corporate Governance</i>	20
2.2.8	Pedoman Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	23
2.2.9	Lemahnya praktik <i>Corporate Governance</i> di Indonesia.....	25
2.2.10	Model dan Unsur-Unsur <i>Corporate governance</i>	26
2.2.11	Penilaian <i>Corporate Governance</i>	27
2.3	Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	29
3.1.1	Sejarah Umum Perusahaan.....	29
3.1.2	Pengembangan Produk.....	31
3.2	Lokasi Penelitian.....	32
3.3	Variabel Penelitian.....	32
3.3.1	Definisi Operasional Variabel.....	33
3.4	Instrumen atau Alat Pengumpulan Data.....	34
3.4.1	Uji Validitas.....	34
3.4.2	Uji Reliabilitas.....	34
3.5	Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5.1	Data yang Diperlukan.....	35

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Populasi dan Sampel.....	37
3.6.1 Populasi.....	37
3.6.2 Sampel.....	37
3.7 Alat Analisis.....	37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Deskriptif.....	40
4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	42
4.3 Analisis Kuantitatif.....	48
4.4 Komposisi Pemegang Saham.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	60
5.3. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Kategori Pemeringkatan CGPI.....	38
4.1 Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
4.2 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden.....	41
4.3 Umur Responden.....	42
4.4 hasil uji validitas.....	43
4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	47
4.6 Kategori Pemeringkatan CGPI 2005.....	48
4.7 Uji One Sample t Test Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan.....	49
4.8 Uji One Sample t Test Hak pemegang saham	50
4.9 Uji One Sample t Test Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham.....	51
4.10 Uji One Sample t Test Peran Stakeholders dalam Tata kelola perusahaan.....	53
4.11 Uji One Sample t Test Pengungkapan dan transparasi.....	54
4.12 Uji One Sample t Test Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi.....	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia sekitar tahun 1997-1998 termasuk Indonesia terasa amat memberatkan kehidupan bagi semua kalangan. Kesulitan yang dialami tidak hanya dirasakan oleh rakyat miskin yang jumlahnya semakin bertambah dengan krisis tersebut, kalangan pelaku usaha pun juga ikut merasakannya. Bagi negara kita, krisis ini kemudian diperburuk lagi dengan krisis politik yang puncaknya berupa jatuhnya pemerintahan Soeharto tahun 1998 sehingga pada akhirnya merusak perekonomian Indonesia. Pada saat itu negara kita bukan lagi mengalami krisis keuangan melainkan krisis ekonomi. Hal ini ditandai dengan menurunnya produk domestik bruto pada tahun 1998, laju inflasi semakin naik menjadi 77,63 persen pada tahun itu dibandingkan hanya 11,05 persen di tahun sebelumnya (Siamat, 2004). Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat juga mengalami penurunan menjadi sekitar Rp. 15.000 (Zhuang dkk. 2001), dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai titik paling rendah sejak masa pemerintahan Soeharto, yakni sebesar minus 13 persen (Kompas 2002).

Awal 2007 terjadi sebuah terobosan baru yaitu Komite Nasional Kebijakan *Governance* telah menyempurnakan pedoman umum GCG dan merintis pembuatan pedoman *Good Public Governance (Combined Code)* yang pertama di

Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Ini merupakan sebuah bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan.

Berdasarkan survei *world Bank* 2007, ada perbaikan dalam situasi bisnis di Indonesia, misalnya pada pembentukan usaha baru, Indonesia telah menunjukkan reformasi positif dengan percepatan pemberian persetujuan lisensi usaha dari Departemen Kehakiman dan simplifikasi persyaratan usaha. Walaupun demikian, dalam urutan peringkat, Indonesia mengalami penurunan. Indonesia berada di urutan 135 dari 175 negara, turun empat peringkat dari tahun 2006. Dari hal ini bisa disimpulkan bahwa penerapan *good governance* di Indonesia telah mengalami kemajuan. Namun di negara-negara lain telah lebih cepat dibandingkan Indonesia, karena mereka yakin bahwa dengan upaya demikian mereka unggul dalam menarik investasi. Survei oleh ACGA (*Asian Corporate Governance Association*) menyebutkan penerapan indikator GCG di Indonesia semuanya berada di bawah rata-rata. Indikator ini meliputi prinsip dan praktik *governance* yang baik, penegakkan peraturan, kondisi politik dan hukum, prinsip akuntansi yang berlaku hukum, dan kultur.

Dapat ditegaskan bahwa GCG itu amat sangat penting karena *bad governance* bisa menyebabkan beban bagi APBN, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, tidak cukup untuk menggerakkan roda perekonomian. Daya saing yang lemah dan maraknya praktik KKN juga dapat memperhambat pemerataan kesempatan berusaha.

Sebagaimana dikemukakan oleh Baird (2000) bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia

lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN) maupun milik swasta. Dengan buruknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi turun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman. Hal ini tentu akan membuat para investor menarik kembali investasi yang telah ditanamkan, sementara bagi investor yang baru enggan melakukan investasi.

Berkaitan dengan definisi *Good Corporate Governance (GCG)*, menurut bank dunia adalah aturan, standard, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditur. Tujuan utama *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. *Good Corporate Governance* terdiri dari sekumpulan perangkat hukum yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, dan kreditur, pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*).

Menurut Sykhroza (2003) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dan dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, inependensi, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisme ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus pada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

PT. NASA merupakan salah satu perusahaan yang bersifat multi level marketing, tentunya memiliki perbedaan dengan perusahaan-perusahaan yang berbeda sifatnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan ini dan mengambil judul "**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Pada PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT.Natural Nusantara (PT.NASA))**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan sistem *Good Corporate Governance* pada PT.Natural Nusantara (PT.NASA)?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Syifani (2006) melakukan penelitian *good corporate governance* pada perguruan tinggi (UII) dengan variabel penelitian *Transparansy, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *good corporate governance* pada Universitas Islam Indonesia. Kesimpulan yang didapat saat itu penerapan *good corporate governance* pada Universitas Islam Indonesia adalah baik walaupun perlu lebih ditingkatkan lagi dalam aspek praktek *corporate governance* nya. Untuk menganalisis data masukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu yang berhubungan dengan dosen, karyawan dan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan skala kuisisioner *elicited verbal attitude*, yaitu jawaban verbal dari responden yang mengukur sikapnya sebagai indikator dari kelakuan verbal dan nonverbal untuk menjamin validitas dan realibilitas.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Didalam literatur akademis, *corporate governance* biasanya dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari pemisahan antara kepemilikan dan kontrol.

Istilah *corporate governance* secara luas telah dikenal dalam dunia usaha. Ada beberapa pengertian *good corporate governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Institut Indonesia Corporate Governance (IICG) mengemukakan *good corporate governance* adalah struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Turnbull (1997) mendefinisikan *corporate governance describes all the influences affecting the institutional processes including those for appointing the controllers and/or regulators, involved in organizing the production and sale of goods and services.*

OECD mendefinisikan *corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spell out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.*

Menurut Syakhroza (2002) mendefinisikan *corporate governance* adalah suatu sistem yang dipakai "Board" untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (*directing, controlling, and supervising*) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif - E3p dengan prinsip-

prinsip *transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness* – TARIF dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Sesuai dengan GCG Workshop Kantor Meneg PM BUMN Desember 1999, definisi *good corporate governance* adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan resiko secara lebih efisien dan efektif serta pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Menurut *forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), corporate governance yaitu, “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”

Menurut bank dunia adalah aturan, standard, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditur. Tujuan utama *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. *Good*

Corporate Governance terdiri dari sekumpulan perangkat hukum yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, dan kreditur, pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*).

Pengertian *corporate governance*, yaitu (1) hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, karyawan, kreditur, pesaing, pelanggan dan lain-lain, (2) mekanisme pengecekan dan pemantauan perilaku manajemen puncak (hirata,2003: 1 dalam Majidah,2004:64)

Salowe (2002) dalam Soegiharto (2005:39) menyatakan bahwa *good corporate governance* dapat diartikan sebagai interaksi antara struktur dan mekanisme yang menjamin adanya *control* dan akuntabilitas, dengan tetap mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan.

Menurut KEP. MENEG BUMN No. 117/2002, *corporate governance* adalah “proses terstruktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai resiko.

Berdasarkan uraian mengenai *corporate governance* tersebut, dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai

kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut.

2.2.2 Latar Belakang Corporate Governance

Pelaksanaan *corporate governance* dilatar belakangi bahwa perusahaan-perusahaan semakin banyak tergantung pada modal ekstern (modal ekuiti serta pinjaman) untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan mereka, melakukan investasi dan menciptakan pertumbuhan. Oleh karena itu demi kepentingan mereka maka perusahaan perlu memastikan kepada pihak penyandang dana ekstern bahwa dana-dana tsb digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan.

Krisis keuangan Asia terutama Indonesia telah memberikan penekanan yang baru pada *corporate governance*, yang menjadi titik sentral krisis dalam perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh generasi keluarga dan kepentingan yang berpautan satu sama lain dan yang telah dibesarkan di lingkungan yang lebih didasari pada hubungan relasi daripada didorong pasar.

Riset Mc Kinsey dan Co dalam Siregar (2005), tentang *good corporate governance* di 7 negara Asia yaitu Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Filipina, Thailand, dan Indonesia, menempatkan Indonesia di posisi terbawah. Lembaga riset Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berkantor di pusat Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terburuk kedua dalam *corporate governance* dengan skor 8,33 pada tahun 2001 dan skor 8,29 pada tahun 2000 (skor 0 sebagai yang terbaik dan skor 10 sebagai yang terburuk). Hasil survey di atas cukuplah memberi pertanda bahwa sudah saatnya perusahaan-perusahaan Indonesia di dorong untuk memperbaiki kualitas *good corporate governance*-nya

Atas dasar itu pula, SWA bekerja sama dengan lembaga independen The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), untuk pertama kalinya di Indonesia menyelenggarakan survey *corporate governance perception index* terhadap perusahaan-perusahaan yang sahamnya sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

2.2.3 Maksud dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance memiliki dampak luas terhadap kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Menurut pedoman Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), *Good Corporate Governance* diperlukan dalam rangka:

3. Memperbaiki kinerja usaha
4. Mempengaruhi harga saham
5. Memperbaiki kinerja ekonomi

Corporate Governance yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, bersifat jangka panjang.

2.2.4 Manfaat Good Corporate Governance

Manfaat penerapan *corporate governance* sebagaimana disebutkan oleh FCGI antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders's value dan dividen.
5. Mengurangi agency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada manajemen

Manfaat *good corporate governance* bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

Corporate Governance yang baik diakui membantu perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal *corporate governance* yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja corporate sampai 30% diatas tingkat kembalian (*rate of return*) yang normal.

Penerapan *corporate governance* yang baik memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Minimalisasi potensial benturan
3. Focus pada strategi utama
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
5. Kestinambungan manfaat (*sustainability of benefit*)
6. Promosi citra korporat (*corporate image*)
7. Peningkatan kepuasan pelanggan
8. Perolehan kepercayaan-kepercayaan investor

Manfaat GCG menurut Komite Nasional *Corporate Governance*:

1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya,

bertanggung jawab dan adil, agar kompetitif serta mendorong iklim investasi

2. Mendorong pengelola perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi, dan RUPS
3. Mendorong agar pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) maupun kelestarian lingkungan disekitar perseroan.

2.2.5 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Beberapa prinsip *Good Corporate Governance* menurut :

1. **OECD (1999):** (1) *Fairness*, (2) *Transparency*, (3) *Accountability*, dan (5) *Responsibility*.
2. **FCGI (*Forum For Corporate Governance in Indonesia*):** (1) *Fairness*, (2) *Disclosure and Transparency*, (3) *Accountability*, dan (4) *Responsibility*.
3. **MENEG BUMN:** (1) *Transparency*, (2) *Independency*, (3) *Accountability*, (4) *Responsibility*, (5) *Fairness*

4. **BPKP:** (1) *Transparency*, (2) *Accountability*, (3) *Fairness*, (4) *Integrity*, (5) *Independency*, (6) *Participation*
5. **Five Principles of Corporate Governance According to OECD (2004):** (1) *the Right of shareholder*, (2) *The equitable treatment of shareholder*, (3) *the role of shareholder*, (4) *Disclosure and Transparency*, (5) *the responsibility of the board*.

Dari berbagai macam pendapat mengenai uraian prinsip-prinsip diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. **Transparan** (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, harus ada keterbukaan baik terhadap prosedur mekanisme dan praktik serta hasil pengawasan yang dilakukan. Hal ini terkait erat dengan sistem komunikasi dan pelaporan yang menjamin mengungkapkan (*disclosure*) implementasi prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan dan kinerja perusahaan, serta informasi-informasi penting lainnya kepada *shareholders* dan *stakeholders* secara memadai, akurat, dan tepat waktu.

2. **Akuntabilitas** (*Accountability*)

Perusahaan menguraikan peran dan tanggung jawab setiap komisaris, direktur, dan manajer senior dengan jelas, beserta ukuran

pencapaiannya. Prinsip ini terkait erat dengan proses pengukuran kinerja, pengawasan, dan pelaporan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Setiap individu dalam perusahaan harus bertanggung jawab atas segala tindakannya, terutama yang berkenaan dengan peranan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Prinsip ini erat kaitannya dengan manajemen resiko-resiko yang dihadapi perusahaan dengan tujuan untuk melindungi bahkan meningkatkan nilai/kepentingan stakeholders dan pemegang saham. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Para komisaris, direktur ataupun manajer senior dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus bebas dari segala bentuk benturan kepentingan yang berkopetensi untuk muncul. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan itu dibuat semata-mata demi kepentingan perusahaan.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa berlaku adil dan berimbang terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

2.2.6 Faktor Keberhasilan dan Kendala Penerapan *Good Corporate Governance*

Keberhasilan penerapan *good corporate governance* juga memiliki prasyarat tersendiri, di sini ada dua faktor yang memegang peranan, yaitu faktor internal dan eksternal (Daniri, 2005:15).

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya hukum yang konsisten dan efektif
- b. Adanya dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dr dektor publik/lembaga pemerintah
- c. Terdapat *benchmark* yang dapat menjadi standard pelaksanaan *good corporate governance* yg efektif dan profesional
- d. Terganggunya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat

- e. Terutama di Indonesia, adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi.

2. Faktor Internal

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan, antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan *good corporate governance*.
- b. Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*.
- c. Adanya manajemen pengendalian resiko perusahaan yang didasarkan pada prinsip dasar *good corporate governance*.
- d. Terdapat sistem audit yang efektif dan adanya keterbukaan informasi bagi publik.

Disamping adanya prasyarat keberhasilan penerapan *good corporate governance*, terdapat juga kendala penerapan *good corporate governance* khususnya di Indonesia sehingga *good corporate governance* sulit diterapkan di Indonesia Menurut Daniri (2005), kendala tersebut diantaranya:

1. Adanya hak-hak pemegang saham yang harus diberi informasi yang benar dan tepat waktu, ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar, dan turut memperoleh bagian keuntungan.
2. Adanya perlakuan sama terhadap para pemegang saham terutama kepada pemegang saham minoritas dan asing, dengan keterbukaan (*transparency*)

informasi yang penting, melarang pembagian untuk pihak sendiri, dan melarang perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

3. Diakuinya peran pemegang saham, bersama pemegang kepentingan yang lain, dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat
4. Adanya kemungkinan pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.
5. Adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

2.2.7 Karakteristik Perusahaan dalam *Corporate Governance*

Masalah *corporate governance* merupakan masalah yang timbul sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda maka barangkali cukup menarik kalau masalah tersebut dikelompokkan sesuai dengan karakteristik perusahaan (Adi,2004):

1. Perusahaan yang struktur kepemilikan sangat tersebar (*dispersed ownership*).

Kepemilikan perusahaan di Amerika tersebar pada pemegang saham kecil sedangkan pengendalian terkonsentrasi di tangan manajer, yang berarti ada pemisahan yang sempurna antara kepemilikan dan pengendalian. Dalam struktur kepemilikan yang tersebar, konflik keagenan antara manajer

dengan pemegang saham sangat mungkin terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya insentif bagi para pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap manajer karena biaya pengawasan yang diperlukan cukup besar. Struktur kepemilikan yang tersebar memang dapat memberikan manfaat dalam hal pemberian kesempatan yang lebih besar kepada manajer untuk memiliki inisiatif, tetapi karena kurangnya pengawasan manajer juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan tindakan dan keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Konflik ini akan semakin parah jika manajer tidak memiliki saham perusahaan.

2. Perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi pada sejumlah kecil pemegang saham yang memiliki prosentasi kepemilikan yang besar (*consentrated ownership*).

Dalam struktur kepemilikan seperti ini, ada yang dinamakan pemegang saham mayoritas (*majority shareholders*) atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) dan pemegang saham minoritas (*minority shareholders*). Pemegang saham besar memiliki insentif yang lebih besar untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap keputusan perusahaan, karena mereka merasakan manfaat yang besar dari pengawasan tersebut. Pemegang saham besar juga memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan *takeover bid* terhadap sebuah perusahaan yang tidak dikelola dengan baik, karena mereka akan merasakan manfaat peningkatan harga saham sebagai hasil perbaikan manajemen. Jadi,

melalui pengawasan yang lebih baik dan *takeover bid*, pemegang saham besar dapat mengatasi masalah keagenan yang timbul dari pemisahan pengendalian dan kepemilikan. Namun demikian, masalah yang timbul dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi adalah konflik kepentingan *controlling shareholders* (pemegang saham pengendali) dengan pemegang saham minoritas, pemegang saham pengendali memiliki kendali terhadap manajemen sehingga keputusan yang diambil cenderung mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Sedangkan pihak manajemen lebih bersifat pasif, sementara campur tangan pemilik begitu besar sehingga menimbulkan adanya *invisible hand*, yaitu pemegang saham mayoritas lebih memiliki kuasa dan otoritas akibatnya manajemen tidak bekerja secara penuh dan pertanggungjawabannya tidak terlalu jelas.

3. Perusahaan BUMN

Di perusahaan ini pemiliknya tidak dapat mengontrol perusahaan secara langsung, pemilik hanya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk (misal : menteri). Dengan demikian kesepakatan terjadi antara wakil pemilik (agen) dengan manajemen (yang juga agen), atau kesepakatan dapat terjadi antara agen (bisa pemilik atau bisa juga pihak manajemen) dengan kreditur. Dalam mengambil keputusan kadang-kadang hanya untuk kepentingan agen, tanpa adanya transparansi dan sistem kontrol yang baik, sehingga sangat besar peluang para agen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri.

4. *Corporate Governance* di sektor korporat dan keuangan.

Beberapa pengamatan disadari bahwa *corporate governance* yang baik akan ditunjukkan oleh kinerja perusahaan yang baik pula. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator pasar modal (bagi perusahaan yang telah *go public*) maupun indikator akuntansi. Kadang pemilik perusahaan sengaja mengambil keputusan berisiko tinggi dengan pertimbangan bahwa kalau keputusan tersebut terbukti berhasil, maka pemilik akan menikmati imbalan yang tinggi. Sedangkan apabila gagal, kreditur diminta untuk ikut menanggung kerugian. Masalah ini disebut sebagai *debt agency problem*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seringkali pihak kreditur mensyaratkan berbagai *covenant* (perjanjian) untuk melindungi kepentingan mereka. Hanya saja apabila perlindungan kepentingan kreditur tersebut tidak efektif, maka makin besar pemilik perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan tersebut (Sulistyanto & Meniek 2003).

2.2.8 Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan penerapan GCG.

Pedoman pokok pelaksanaan:

1. Dalam rangka penerapan GCG, masing-masing perusahaan harus menyusun pedoman GCG perusahaan dengan mengacu pada pedoman GCG KNKCG

dan Pedoman Sektor (bila ada). Pedoman GCG perusahaan tersebut mencakup sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1.1. Visi, Misi dan Nilai-nilai perusahaan;
 - 1.2. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Penunjang Dewan Komisaris, dan Pengawasan Internal;
 - 1.3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif;
 - 1.4. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar;
 - 1.5. Pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis;
 - 1.6. Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
 - 1.7. kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG.
2. Agar pelaksanaan GCG efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan, untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut:
- 2.1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh semua anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali, serta semua karyawan
 - 2.2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan;

- 2.3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG perusahaan;
- 2.4. Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari;
- 2.5. Melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.

2.2.9 Lemahnya praktik *Corporate Governance* di Indonesia

Penerapan *good corporate governance* di Indonesia dinilai rendah di banding negara-negara Asia lainnya yaitu Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Filipina, Thailand. Indonesia berada di peringkat akhir (Mc Kinsey & co). Hal tersebut disebabkan antara lain

- 1) Dengan mengimplementasikan *good corporate governance* berarti membuka rahasia bisnis ke khalayak, sehingga bisa mematikan masa depan bisnis
- 2) Dengan mengimplementasikan *good corporate governance* akan melibatkan pihak lain yang berarti lebih rumit dan berbelit-belit, disamping juga menambah biaya.

- 3) Perusahaan tidak ingin kelemahan-kelemahan yang ada diatas yang ada padanya terekspos sebagai akibat dari pengimplementasian *good corporate governance*
- 4) Lemahnya infrastruktur untuk mewujudkan *good corporate governance*, seperti lembaga-lembaga pengawasan baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga departemen.
- 5) Masalah *good corporate governance* yang masih sebatas wacana, sementara praktik dan keteladanan dari aparaturnegara belum terlihat.

2.2.10 Model dan Unsur-Unsur Corporate governance

Keasey dkk memberikan tiga model yang dikenal dalam *good corporate governance* diantaranya adalah:

- 1) *Principal agent model* atau *agency theory*, artinya korporasi dikelola untuk memberikan win-win solution bagi pemegang saham sebagai pemilik di satu pihak dan manajer di pihak lain
- 2) *The myopic market model*, memfokuskan perhatian ada kepentingan pemegang saham dan manajer dimana sentimen pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar corporate governance
- 3) *Stakeholders model*, memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas.

2.2.11 Penilaian *Corporate Governance*

Indeks persepsi *good corporate governance* di survey dari persepsi atau cara pandang Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) terhadap penerapan *good corporate governance* para aresponden. Persepsi ini diperoleh melalui 3 pendekatan yaitu; pertama, kepemilikan saham. Kedua, wawancara dengan wakil perseroan (sekretaris korporat). Ketiga, analisis informasi publik (laporan keuangan, berita di media massa, situs korporat). Sedangkan indikator penilaian menggunakan dua tahapan: pertama, pengisian kuisisioner *self assesment* oleh responden, yang sifatnya kuantitatif dan menggunakan skala penilaian 0-100. dalam tahap ini responden survey terdiri dari komisaris independen, direksi dan karyawan yang tidak ada pembedaan kuisisioner. Kuisisioner tersebut berisi 7 kisi pertanyaan yang harus dijawab, meliputi; (1) komitmen terhadap *good corporate governance*; (2) pemenuhan hak pemegang saham; (3) tata kelola dewan komisaris; (4) komite fungsional seperti komite audit; komite remunerasi dan komitenominasi; (5) dewan direksi; (6) hubungan dengan stakeholders; (7) transparansi dan akuntabilitas.

Kuisisioner itu sendiri disusun berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku seperti UU No. 1 tentang perusahaan terbatas, UU No. 8 / 1995 tentang pasar modal, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan Bursa Efek Jakarta (BEJ). Untuk prinsip-prinsip *good corporate governance*, diambil dari panduan yang telah ditetapkan OECD dan Komnas *good corporate governance*

Tahap kedua, penilaian kualitatif dalam bentuk interview panel pakar 15 responden yang nilainya tertinggi dari hasil *self assesment*. Setiap responden

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Umum Perusahaan

PT Natural Nusantara (PT.NASA) ini didirikan karena keprihatinan mendalam yang terjadi terhadap kondisi ekosistem di muka bumi yang mengalami proses kerusakan akibat pengembangan dan rekayasa kimia dasar dengan dosis dan pengaplikasian yang kurang bijaksana yang dampaknya juga akan berujung pada manusia. Secara lebih khusus dan mendalam juga dicermati kondisi dunia agrokomples di Indonesia dimana aspek yang paling mendasar yaitu objek (menyangkut tanaman, ternak, ikan) dan subyek (menyangkut pelaku pertanian/petani) yang masih memprihatinkan di semua sisi dimana ssesungguhnya begitu besar sekali potensi Indonesia di bidang ini. Di sisi obyeknya aspek Kuantitas-Kualitas-Kelestarian (K-3) produksi Agrokomples masih jauh dari potensi optimalnya sementara di sisi subyeknya aspek pola pikir-Mental-motivasi-Keilmuan-Modal juga masih belum mencapai kompetensinya.

Sadar akan kondisi tersebut, pada tahun 1985 telah dilakukan penelitian dan pengembangan untuk perbaikan lingkungan yang bertujuan untuk aspek objeknya dahulu yang hingga sekarang telah menghasilkan banyak produk dan teknik budidaya di bidang agrokomples yang semuanya berasaskan *Back to Nature*. Hasil-hasil yang didapat dari kegiatan penelitian dan pengembangan pada awalnya berwujud produk pupuk organik cair dan Hormon/ Zat pengatur Tumbuh

Organik juga beberapa teknik budidaya banyak dimanfaatkan untuk keperluan internal selain juga kepada lingkungan dan belum disebarluaskan.

Semenjak tahun 1996 mulai disebarluaskan lebih intensif atas permintaan beberapa pihak dengan mengingat hasil-hasil positif di lapangan selama digunakan dan keprihatian mendalam mencermati kondisi Agrokompleks di Indonesia.

Sebagai wujud implementasi asas *Back to Nature* yang berlaku untuk semua makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya maka semenjak tahun 2002 Riset & Development juga dikembangkan ke produk-produk alam untuk manusia dimana Indonesia juga mempunyai potensi yang sangat besar di bidang ini

Pada 1 Oktober 2002 ditetapkan untuk disebarluaskan dengan sistem jaringan. Pengembangan aspek subyek (SDM pertaniannya) dilakukan melalui sistem jaringan bertahap diharapkan dapat *ter-up grade* (meningkat) di sisi pola (pikir), mental, motivasi, keilmuan dan permodalan dengan cukup efektif, efisien dan cepat.

Dengan prinsip kerja untuk bisa menjadi dan mendapatkan P-rofit, P-engetahuan, L-eluasa, NA-ma baik, S-ilaturahmi dan A-mal.

- Visi : Hidup Bahagia dan Sejahtera Selaras Alam
- Misi : Bersama Menuju Masa Depan Lebih Baik
- Tujuan : Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

3.1.2 Pengembangan Produk

PT.Natura Nusantara (PT.NASA) bergerak dalam bidang Agrokomples (Pertanian, peternakan,perikanan) yang meliputi :

1. PERTANIAN
 - Pupuk Organik
 - Pengendali Hama-Penyakit alami
2. PETERNAKAN
 - Suplemen Nutrisi Ternak dan Unggas
3. PERIKANAN
 - Suplemen Nutrisi ikan / Udang
 - Pembenh lingkungan kolam / Tambak

Semua produk diatas dikembangkan dengan prinsip K-3 yang meliputi aspek Kualitas-Kuantitas-Kontinuitas.

Aspek Kualitas, semua produk telah digunakan untuk berbagai macam komoditi pertanian (sub.sektor Pangan, Hortikultura) dan Tahunan/Perkebunan), peternakan (sub.sektor Ternak dan Unggas) dan perikanan (darat dan payau/tambak) di semua pulau di Indonesia dimana hasil-hasil yang diperoleh didokumentasikan dalam bentuk *Video Compact Disc (VCD)*

Khusus aspek Kuantitas dan Kontinuitas (POC NASA, HORMONIK, SUPERNASA, POWER NUTRITION, TON, VITERNA) dari ketersediaan bahan

baku dipergunakan 30% deposit bahan baku cukup untuk memenuhi kebutuhan Indonesia selama kurang lebih 16 ribu tahun, diaman sisanya (70%) dapat dipergunakan untuk dunia guna menunjang agenda (21 Back to Nature),

Produk-produk di bidang kesehatan yang telah berhasil dikembangkan adalah Food Supplement (Nutrisi Alami) untuk membantu menyembuhkan dan menjaga kebugaran tubuh dimana telah berhasil menyembuhkan beberapa macam penyakit diantaranya Stroke, Asam Urat, Jantung, Lever, Sizoprenia (kejiwaan), Ginjal, Diabetes, juga luka luar (luka bakar) dimana hasil-hasil yang didapat didokumentasikan dalam bentuk *Video Compact Disc* (VCD)

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada PT. NASA yang berlokasi di jalan Ki Mangun Sarkoro No. 37 Rt.011 Re.03 Kelurahan Gunung Kentur, Kecamatan Pakualaman 7 Yogyakarta.

3.3 Variabel Penelitian

GCG melalui penerapan prinsip dasar *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*, pada penelitian ini dicerminkan dan diukur dengan enam cakupan penilaian riset, yaitu :

1. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik
2. Hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci
3. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham
4. Peran stakeholders dalam tata kelola perusahaan
5. Pengungkapan dan transparansi

6. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

3.3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan

Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan adalah sistem CG yang mendorong anggota perusahaan untuk menyelenggarakan GCG dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.

2. Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Kunci

Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Kunci adalah sistem CG yang dapat melindungi dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak pemegang saham.

3. Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham

Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham adalah sistem CG yang dapat menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan tanggapan yang efektif terhadap pelanggaran hak-hak pemegang saham.

4. Peran *Stakeholders* dalam Tata Kelola Perusahaan

Peran *Stakeholders* dalam Tata Kelola Perusahaan adalah sistem CG yang dapat mengakui hak-hak para *stakeholder* yang telah ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian kerjasama, dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan para *stakeholder* dalam penciptaan kesejahteraan,

lapangan kerja, kondisi keuangan perusahaan yang sehat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. Pengungkapan dan Transparansi

Pengungkapan dan Transparansi adalah sistem CG yang dapat menjamin terlaksananya kelengkapan pengungkapan dengan tepat waktu dan akurat atas semua informasi material yang berkaitan dengan perusahaan melalui berbagai media.

6. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sistem CG yang dapat menjamin pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap pengelolaan perusahaan

3.4 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data

3.4.1 Uji Reliabilitas

Setelah diketahui validitas instrumen, perlu dilakukan uji reliabilitas yaitu untuk menguji apakah instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif dapat dipercaya, maka perlu di tes reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach . Dalam hal ini perhitungannya juga menggunakan bantuan komputer program SPSS

3.4.2 Uji Validitas

Uji validitas berhubungan dengan ketepatan pengukuran, artinya apakah instrumen yang disusun seorang peneliti tepat mengukur apa yang akan

diukur. Untuk mengetahuinya tingkat validitas item kuesioner dalam penelitian ini digunakan analisis korelasi dari *Pearson's Product Moment* (i mana perhitungannya menggunakan bantuan komputer program SPSS. *Item-item*, dinyatakan valid apabila r hitung yang dihasilkan lebih besar dari nilai r tabel

3.5 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Data yang diperlukan

untuk mendapatkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya oleh penulis. Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu salah satu metode pengumpulan data primer yang informasinya diperoleh melalui permintaan keterangan-keterangan kepada responden, dan cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengajukan daftar pertanyaan atau kuisisioner. Daftar pertanyaan tersebut meliputi variabel-variabel penelitian yang hendak diteliti meliputi: Komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, Hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci, Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, Peran stakeholders dalam tata kelola perusahaan, Pengungkapan

3.6 Populasi dan Sampel

3.6.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah pemimpin dari PT. NASA, yang meliputi direksi, Dewan Komisaris, jajaran manajer, serta supervisor dari PT.NASA.

3.6.2 Sampel

Sampel adalah sebagian populasi yang diambil atau ditentukan berdasarkan karakteristik tertentu dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Didalam penelitian ini digunakan sample sebanyak delapan (9) orang responden, yang terdiri dari satu (1) orang Presiden Komisaris, satu (1) orang Komisaris, satu (1) orang Direktur Utama, dua (2) orang Manager, dan empat (4) orang Supervisor

3.7 Alat Analisis

Pengisian kuisisioner *self assesment* oleh responden, yang sifatnya kuantitatif. Skala yang digunakan dalam penilaian ini 0-100.

Selanjutnya metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan alat analisis statistik *one sample t-tes*. Penilaian hasil pelaksanaan baik atau tidaknya penerapan *good corporate governance* ini mengacu pada panduan yang telah ditetapkan OECD dan Komnas *good corporate governance*. Acuan tersebut dapat dilihat dari tabel 3.1

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat ini peneliti melakukan analisis data yang telah terkumpul. Data yang telah dikumpulkan tersebut merupakan hasil jawaban responden yaitu direksi dan pemegang saham serta jajaran manajer PT. NASA di Yogyakarta. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menyajikan data dalam bentuk persentase. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada hasil perhitungan statistik untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Peneliti telah menyebar kuesioner sebanyak 9 eksemplar dengan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 9 eksemplar dan seluruh jawaban terisi secara lengkap, sehingga total kuesioner yang dapat dijadikan sebagai sumber data 9 responden atau 100% dari jumlah kuesioner yang disebar. Data ini dirasa sudah cukup karena tingkat pengembalian sudah melebihi nilai minimal yaitu sebanyak 20%.

4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah analisis karakteristik responden. Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi, jenis kelamin, umur responden dan jabatan. Karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil jawaban responden tentang jenis kelamin dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah orang	Persentase
Laki-laki	8	88.9%
Perempuan	1	11.1%
Total	9	100.0%

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2008 (Lampiran 3, hal: 8)

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 8 orang atau 88,9% dan sisanya 1 orang atau 11,19% adalah berjenis kelamin wanita. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pimpinan perusahaan masih ditempati oleh kaum laki-laki, sesuai dengan perusahaan ini yang bergerak dibidang Agrokomplek untuk pertanian, peternakan dan perikanan.

b. Jabatan Responden

Jabatan responden mempengaruhi peranan manajer atau karyawan dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Hasil karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

Jabatan	Jumlah orang	Persentase
Direktur	1	11.1%
Komisaris	1	11.1%
Manajer	2	22.2%
Presiden Komisaris	1	11.1%
Supervisor	4	44.4%
Total	9	100.0%

Sumber : Data primer, 2008

Dengan melihat struktur jabatan responden mayoritas adalah sebagai supervisor yaitu sebanyak 4 orang atau 44,4%. Sisanya mereka menjabat sebagai direktur, komisaris, presiden komisaris, dan manajer. Dengan posisi jabatan tersebut maka hasil jawaban yang diberikan tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. NASA Yogyakarta cukup valid.

c. Umur Responden

Berdasarkan hasil jawaban terhadap umur responden diketahui umur responden termuda adalah 27 tahun dan usia tertuanya adalah 51 tahun, dan frekuensi tabelnya dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.3
Umur Responden

Umur	Jumlah orang	Persentase
< 30 tahun	3	33.3%
31 - 40 tahun	3	33.3%
41 - 50 tahun	2	22.2%
> 50 tahun	1	11.1%
Total	9	100.0%

Sumber : Data primer diolah, 2008

Dengan melihat struktur umur responden yang bekerja pada PT. NASA di Yogyakarta dapat diketahui bahwa dari 9 responden sebagian besar responden berusia kurang dari 30 tahun dan antara 30 – 40 tahun yaitu masing-masing sebanyak 3 orang atau 33,3%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden yang bekerja berumur 41 –50 tahun sebanyak 2 orang atau 22,2% dan 1 orang atau 11,1% berusia lebih dari 50 tahun.

Hal ini berarti sebagian besar responden adalah berusia produktif, sehingga diharapkan akan mendukung program *Good Corporate Governance* pada PT. NASA di Yogyakarta.

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan responden sebanyak 9 responden. Syarat-syarat yang ditentukan untuk menyatakan bahwa setiap pernyataan

adalah valid yaitu 1) skor pernyataan berkorelasi positif dengan skor totalnya dan 2) peluang ralat (p) maksimum adalah 0,05 dalam uji satu ekor.

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai p value dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai p -value lebih kecil dari 0,05 maka pernyataan tersebut adalah valid dan sebaliknya jika lebih besar dari 0,05 maka butir dinyatakan gugur.

Setelah melalui proses pengolahan data dengan program SPSS 12.0, maka hasil uji validitas dapat dilihat dalam Tabel 4.4. Adapun perhitungan selengkapnya tentang pengujian validitas ini dapat dilihat dalam lampiran.

Tabel 4.4

Rangkuman hasil uji validitas instrumen pertanyaan

Aspek GCG	No. Item	r xy	p-value	Keterangan
Komitmen tata kelola perusahaan	1	0.779	0.013	Valid
	2	0.904	0.001	Valid
	3	0.982	0.000	Valid
	4	0.914	0.001	Valid
	5	0.948	0.000	Valid
	6	0.943	0.000	Valid
	7	0.883	0.002	Valid
	8	0.900	0.001	Valid
	9	0.990	0.000	Valid
	10	0.922	0.000	Valid
	1	0.941	0.000	Valid
	2	0.945	0.000	Valid
	3	0.917	0.001	Valid

	4	0.905	0.001	Valid
	5	0.895	0.001	Valid
Perlakuan setara terhadap pemegang saham	1	0.950	0.000	Valid
	2	0.924	0.000	Valid
	3	0.973	0.000	Valid
	4	0.978	0.000	Valid
	5	0.959	0.000	Valid
Peran Stakeholder	1	0.912	0.001	Valid
	2	0.785	0.012	Valid
	3	0.907	0.001	Valid
	4	0.953	0.000	Valid
	5	0.921	0.000	Valid
	6	0.925	0.000	Valid
	7	0.914	0.001	Valid
	8	0.958	0.000	Valid
	9	0.905	0.001	Valid
	10	0.942	0.000	Valid
	11	0.929	0.000	Valid
Pengungkapan dan Transparansi	1	0.754	0.019	Valid
	2	0.767	0.016	Valid
	3	0.917	0.000	Valid
	4	0.856	0.003	Valid
	5	0.844	0.004	Valid
	6	0.886	0.001	Valid
	7	0.823	0.006	Valid
	8	0.789	0.012	Valid
	9	0.883	0.002	Valid

	18	0.932	0.000	Valid
--	----	-------	-------	-------

Sumber : Data Primer Diolah, 2008

Seperti telah dikemukakan diatas bahwa, bila peluang ralat (p-value) lebih kecil dari 0,05, maka butir instrumen dinyatakan valid. Dari hasil uji validitas tersebut terdapat beberapa butir yang gugur dengan $p > 0,05$ yaitu 3 butir untuk aspek pengungkapan dan transparasi, dan 2 butir untuk pertanyaan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi. Sedangkan sisanya butir dapat dinyatakan valid karena memiliki probabilitas $< 0,05$. Selanjutnya untuk butir yang gugur tidak disertakan dalam analisis selanjutnya, termasuk uji reliabilitas, dan analisis one sample t test.

b. Uji Keandalan Instrumen Penelitian (*Reliability Test*)

Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Program SPSS memberikan fasilitas untuk reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) $\geq 0,6$ (Nunally ,dalam Ghozali : 2001). Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan bantuan program komputer SPSS 11.0 dapat dirangkum seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koef. Alpha Cronbach' s	Nilai kritis	Keterangan
Komitmen tata kelola perusahaan	0.975	0.6	Reliabel
Hak pemegang saham	0.952	0.6	Reliabel
Perlakuan setara terhadap pemegang saham	0.975	0.6	Reliabel
Peran Stakeholder	0.980	0.6	Reliabel
Pengungkapan dan Transparasi	0.963	0.6	Reliabel
Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi	0.974	0.6	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2008

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha untuk keenam variabel *Good Corporate Governance* lebih besar dari 0,6. Dengan mengacu pada teori diatas maka semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah handal. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.2 Analisis Kuantitatif

Pengujian hipotesis penelitian menyatakan bahwa “penerapan sistem *good corporate governance* pada PT. NASA Yogyakarta adalah dapat dipercaya”. Dalam pengujian hipotesis ini digunakan *One Sample t test* dengan level

signifikan 5%. Uji *One Sampel t test* dilakukan dengan membandingkan rata-rata persepsi direksi dan pemegang saham serta jajaran manajer PT. NASA Yogyakarta dengan rata-rata harapan (persepsi standar). Untuk menentukan rata-rata harapan dapat ditentukan berdasarkan Kategori pemeringkatan CGPI 2005.

Tabel 4.6.

Kategori Pemeringkatan CGPI 2005

Skor	Level Terpercaya
55-69	Cukup Terpercaya
70-84	Terpercaya
85-100	Sangat Terpercaya

Dengan demikian nilai rata-rata 70 sebagai batas nilai ideal apakah penerapan CGPI dapat dipercaya atau tidak. Jika nilai rata-rata lebih besar daripada rata-rata ideal (70) maka penerapan *Good Corporate Governance* dapat dipercaya, dan sebaliknya jika dibawah rata-rata ideal (70) maka penerapan *Good Corporate Governance* dikatakan tidak dipercaya.

1. Penerapan GCG terhadap Aspek Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Hasil pengujian *one sample t test* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7

***Uji One Sample t Test* Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan**

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Komitmen tata kelola perusahaan	9	76.8889	14.64108	4.88036

One-Sample Test

	Test Value = 70					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Komitmen tata kelola perusahaan	1.412	8	.196	6.88889	-4.3652	18.1430

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek komitmen terhadap tata kelola perusahaan memiliki rata-rata sebesar 76,889. Nilai ini diatas nilai rata-rata ideal yaitu 70 dengan demikian penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek komitmen terhadap tata kelola perusahaan dapat dipercaya. Hasil statistik t menunjukkan nilai sebesar 1,412 dengan probabilitas sebesar 0,196 yang nilainya diatas 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek komitmen terhadap tata kelola perusahaan masih sama dengan angka minimal yaitu 70 yang berada pada kriteria dapat dipercaya. Hal ini berarti komitmen terhadap tata kelola perusahaan adalah sistem *Good Corporate Governance* mendorong anggota perusahaan untuk menyelesaikan GCG dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Walaupun tidak signifikan namun jika dilihat dari rata-rata > 70 dapat dinyatakan bahwa penerapan aspek ini **dapat dipercaya**.

2. Penerapan GCG terhadap Hak pemegang saham

Hasil pengujian *one sample t test* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8

Uji One Sample t Test Hak pemegang saham

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Hak pemegang saham	9	84.0000	15.29706	5.09902

One-Sample Test

	Test Value = 70					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Hak pemegang saham	2.746	8	.025	14.00000	2.2416	25.7584

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek Hak pemegang saham memiliki rata-rata sebesar 84. Nilai ini diatas nilai rata-rata ideal yaitu 70 dengan demikian penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek Hak pemegang saham **dapat dipercaya**. Hasil statistik t menunjukkan nilai sebesar 2,746 dengan probabilitas sebesar 0,025 yang nilainya dibawah 0,05 maka H_a diterima yang berarti penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek Hak pemegang saham jauh diatas angka standar (dipercaya) dengan angka minimal yaitu 70 yang berada pada kriteria dapat **sangat terpercaya**. Hal ini berarti perusahaan telah mampu melindungi dan memfasilitasi penenuhan hak-hak pemegang saham. Dengan penerapan yang sangat terpercaya ini berarti perusahaan telah memberikan laporan tahunan , semesteran, kuartalan, secara

tepat, serta perusahaan mampu memberikan notulensi rapat kepada pemegang saham sehingga pemegang saham mampu memperoleh gambaran yang akurat, andal dan mutahir mengenai informasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan.

3. Penerapan GCG terhadap Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham

Hasil pengujian one sample t test dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9

Uji One Sample t Test Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Perlakuan setara terhadap pemegang saham	9	82.8889	13.86042	4.62014

One-Sample Test

	Test Value = 70					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Perlakuan setara terhadap pemegang saham	2.790	8	.024	12.88889	2.2348	23.5429

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham memiliki rata-rata sebesar 82,889. Nilai ini diatas nilai

rata-rata ideal yaitu 70 dengan demikian penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham **dapat dipercaya**. Hasil statistik t menunjukkan nilai sebesar 2,790 dengan probabilitas sebesar 0,024 yang nilainya dibawah 0,05 maka H_a diterima yang berarti penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham jauh diatas angka standar (dipercaya) dengan angka minimal yaitu 70. Karena signifikan diatas angka 70 maka kriteria penerapan ini **sangat terpercaya**. Hal ini berarti perusahaan telah memberikan perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham sehingga sistem *Good Corporate Governance* ini dapat menjamin terhadap pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. semua pemegang saham telah diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan tanggapan yang efektif terhadap pelanggaran hak-hak pemegang saham.

4. Penerapan GCG terhadap Peran Stakeholders dalam Tata kelola perusahaan

Hasil pengujian *one sample t test* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10

Uji *One Sample t Test* Peran Stakeholders dalam Tata kelola perusahaan

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Peran Stakeholder	9	81.2122	13.83914	4.61305

One-Sample Test

	Test Value = 70					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Peran Stakeholder	2.431	8	.041	11.21222	.5745	21.8499

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek Peran Stakeholders dalam Tata kelola perusahaan memiliki rata-rata sebesar 81,2122. Nilai ini diatas nilai rata-rata ideal yaitu 70 dengan demikian penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek Peran Stakeholders dalam Tata kelola perusahaan **dapat dipercaya**. Hasil statistik t menunjukkan nilai sebesar 2,431 dengan probabilitas sebesar 0,041 yang nilainya dibawah 0,05 maka H_0 diterima yang berarti penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek Peran Stakeholders dalam Tata kelola perusahaan jauh diatas angka standar (dipercaya) dengan angka minimal yaitu 70. Karena signifikan diatas angka 70 maka kriteria penerapan ini **sangat terpercaya**. Hal ini berarti perusahaan telah mendorong kerjasama mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan para *stakeholder* dalam penciptaan kesejahteraan, lapangan kerja, kondisi keuangan perusahaan yang sehat serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan.

5. Penerapan GCG terhadap Pengungkapan dan transparansi

Hasil pengujian *one sample t test* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11

Uji One Sample t Test Pengungkapan dan transparansi

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pengungkapan dan Transparasi	9	74.3700	14.77029	4.92343

One-Sample Test

	Test Value = 70					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Pengungkapan dan Transparasi	.888	8	.401	4.37000	-6.9835	15.7235

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek Pengungkapan dan transparasi memiliki rata-rata sebesar 74,37 Nilai ini diatas nilai rata-rata ideal yaitu 70 dengan demikian penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek Pengungkapan dan transparasi **dapat dipercaya**. Hasil statistik t menunjukkan nilai sebesar 0,888 dengan probabilitas sebesar 0,401 yang nilainya diatas 0,05 maka H_a ditolak yang berarti penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek Pengungkapan dan transparasi masing sama angka standar (dipercaya) dengan angka minimal yaitu 70. Karena tidak signifikan maka kriteria penerapan ini **terpercaya**. Hal ini berarti perusahaan telah memberikan kelengkapan pengungkapan dengan tepat waktu dan akurat atas semua informasi material yang berkaitan dengan perusahaan melalui berbagai media.

6. Penerapan GCG terhadap Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Hasil pengujian *one sample t test* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12

Uji *One Sample t Test* Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi	9	70.8356	12.11084	4.03695

One-Sample Test

	Test Value = 70					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi	.207	8	.841	.83556	-8.4737	10.1448

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi memiliki rata-rata sebesar 70,83 Nilai ini diatas nilai rata-rata ideal yaitu 70 dengan demikian penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi **dapat dipercaya**. Hasil statistik t menunjukkan nilai sebesar 0,207 dengan probabilitas sebesar 0,841 yang nilainya diatas 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek Tanggung jawab dewan komisaris

dan dewan direksi masing sama angka standar (dipercaya) dengan angka minimal yaitu 70. Karena tidak signifikan maka kriteria penerapan ini **terpercaya**. Hal ini berarti perusahaan telah memiliki komite audit yang dipimpin komisaris independent dengan anggota yang berasal dari pihak eksternal dan sudah berjalan dengan baik. Selain itu komite audit dan komisaris independent yang dimiliki memiliki kompetensi yang baik, dan telah melaksanakan tugasnya seperti melakukan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan, komite audit dapat bekerjasama dengan auditor internal, melakukan telaah terhadap keadaan dan kinerja perusahaan. Begitu juga dengan dewan komisaris telah bersungguh-sungguh serta memiliki tanggung jawab pribadi dalam menjalankan fungsi dan tugas.

4.4 Komposisi Pemegang Saham

Keberhasilan *corporate governance* dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu faktor makro dan mikro. Dari sudut pandang akuntansi dan keuangan, maka keberhasilan *corporate governance* antara lain dipengaruhi oleh proporsi kepemilikan saham, proporsi dewan Komisaris, dan peran Komite Audit dalam mekanisme *corporate governance*.

Pemegang saham pada PT. Nasa terdiri dari 10 orang, yang komposisinya hampir dibagi rata antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas. Pemegang saham tersebut hanya terdiri dari orang-orang yang bekerja pada PT. Nasa tersebut. Dalam ADRT (Anggaran Dasar dan Rumah Tangga), PT. Nasa

mengizinkan Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi menjabat sebagai pemegang saham. Pada kenyataannya pun, Presiden Komisaris, Komisaris dan Dewan Direksi ikut menjadi salah satu pemegang saham disamping para karyawan dan manajer yang Ada. Artinya PT. Nasa menggunakan model dan unsur-unsur *principal agent model* atau *agency theory*, yang berarti korporasi dikelola untuk memberikan *win-win solution* bagi pemegang saham sebagai pemilik di satu pihak dan manajer di pihak lain.

Agency model tersebut dapat dilihat dari kebijakan pendanaannya adalah merupakan pendanaan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber dana sehingga dapat digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Keputusan yang diambil oleh manajemen dalam pencarian sumber dana tersebut sangat dipengaruhi oleh pemilik / pemegang saham. Sesuai dengan tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kemakmuran pemegang sahamnya, maka setiap kebijakan yang akan diambil oleh pihak manajemen selalu dipengaruhi oleh keinginan para pemegang saham.

Di sisi lain pihak manajemen juga mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Manajemen lebih berkepentingan untuk mendapatkan kompensasi dari hasil operasional perusahaan yang dijalankan. Kepentingan yang berbeda tersebut menyebabkan adanya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham.

Pemegang saham pada PT. Nasa menerima semua laporan baik laporan semesteran dan kuartalan secara tepat waktu dari perusahaan, sedangkan untuk laporan tahunan akan dimasukkan melalui penyelenggaraan Rapat Umum

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. NASA Yogyakarta dapat dinyatakan berjalan dengan baik dengan predikat terpercaya dan sangat terpercaya. Hasil pada masing-masing aspek dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek komitmen terhadap tata kelola perusahaan masih sama dengan angka minimal yaitu 70 yang berada pada kriteria **dapat dipercaya**. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata > 70 dan namun tidak signifikan.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan aspek Hak pemegang saham jauh diatas angka standar (dipercaya) dengan angka minimal yaitu 70 yang berada pada kriteria dapat **sangat terpercaya**. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata > 70 dan signifikan.
3. penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham **dapat dipercaya**. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata > 70 dan signifikan.
4. Penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek Peran Stakeholders dalam Tata kelola perusahaan **dapat dipercaya**. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata > 70 dan namun tidak signifikan

5. Penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek Pengungkapan dan transparansi **dapat dipercaya**. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata > 70 dan namun tidak signifikan.
6. Penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi **dapat dipercaya**. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata > 70 dan namun tidak signifikan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yang kemungkinan dapat menimbulkan bias atau ketidakakuratan pada hasil penelitian ini. Pertama penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner, peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sebenarnya, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara tertulis. Sumber data dalam penelitian ini sangat minim, yaitu hanya 9 responden sehingga kurang memenuhi syarat penelitian yaitu minimal 30 responden. Hal ini tentunya kesimpulan yang diungkapkan kurang dapat dipercaya.

5.3. Saran

1. Bagi PT. NASA Yogyakarta hendaknya terus meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* ini semaksimal mungkin, agar kinerja perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Langkah yang dilakukan adalah membenahi penerapan *Good Corporate Governance* terutama

DAFTAR PUSTAKA

- Forum For Corporate Governance (2003). "*Corporate Governance* Tata Kelola Perusahaan", <http://www.fecg.co.id>
- Syakhroza, Ahmad. (2002). Mekanisme Pengendalian Internal dalam melakukan Assesment terhadap pelaksanaan *good corporate governance*, majalah usahawan Indonesia, No.08, Vol xxxI, PP 41-52
- Hadi, N.(2002); Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Aseli Dagadu Djokdja. Skripsi sarjana (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII
- Keasey et. Al. dalam Sunarto. (2003). "Good Corporate Governance dan Kinerja Saham" Fokus Ekonomi, Vol.2, No. 3 (Desember), 240-257
- Agoes, Sukrisno.(2004). "Penerapan Good Corporate Governance pada Perguruan Tinggi". Pembahasan Teoritis. Diambil 21 mei 2008 dari <http://www.google.com>
- Combees, Paul dan Merk Watson (2000), Three Surveeys on Corporate Governance, The Mckinsey Quarterly, No.04
- Darmawati, Khomsiyah, dkk. (2006). "*Laporan Corporate Governance Perception Index*; The Indonesian Institute for Corporate Governance
- Wibisono, Sri.(2003). "Good Corporate Governance berhasilkah diterapkan di Indonesia". Diambil 21 Mei 2008 dari <http://www.google.com>

LAMPIRAN

KUESIONER
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PADA PT NASA YOGYAKARTA)

Nama Responden :
 Jabatan :
 Umur :
 Jenis Kelamin : () Laki-laki () Perempuan

Petunjuk Pengisian:

1. Berilah Tanda Silang (X) Pada Jawaban Yang Sesuai Dengan Pilihan Anda
2. Jika diperlukan Saudara dapat menambahkan pada kertas lain untuk menjelaskan jawaban Saudara

Komitmen Terhadap Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Pedoman tata kelola perusahaan belum dibuat												Pedoman tata kelola perusahaan sudah dibuat dan dijalankan setiap elemen perusahaan
Perusahaan belum memiliki fungsi khusus untuk menerapkan nilai-nilai GCG												Perusahaan telah memiliki fungsi khusus yang telah berjalan dengan baik
Semua pihak tidak mengetahui, tidak memberikan perhatian dan tidak peduli dengan penerapan GCG												Semua pihak mengetahui, memberikan perhatian, peduli, dan menerapkan GCG
Pihak yang terkait tidak mengetahui, tidak memberikan perhatian, dan tidak peduli dengan peraturan yang telah ditetapkan												Pihak yang terkait mengetahui, memberikan perhatian, dan menjalankan semua peraturan yang telah ditetapkan
Semua pihak merasa tidak perlu menerapkan GCG												Semua pihak menganggap penting penerapan GCG

Dalam bekerja, karyawan belum mencerminkan penerapan prinsip-prinsip GCG
 Setiap fungsi tidak tanggap dan malas dalam menerapkan serta memperbaharui praktik-praktik GCG
 Tidak ada penghargaan terhadap keberhasilan penerapan praktik GCG
 Praktik penerapan GCG tidak termasuk dalam indikator keberhasilan manajemen
 Perusahaan tidak menetapkan anggaran dan pelaksana tertentu

Dalam bekerja, karyawan sudah mencerminkan dan menerapkan prinsip GCG
 Setiap fungsi tanggap, berupaya keras dan melakukan pembaharuan dalam penerapan praktik GCG
 Penghargaan terhadap keberhasilan penerapan praktik GCG telah dibuat dan telah diterapkan
 Praktik penerapan GCG sudah dimasukkan dalam indikator keberhasilan manajemen
 Perusahaan sudah menetapkan dan melaksanakan anggaran dan pelaksana tertentu agar terwujud praktik GCG

Hak Pemegang Saham

Perusahaan tidak memberikan laporan tahunan
 Perusahaan tidak memberikan laporan semesteran
 Perusahaan tidak memberikan laporan kuartalan
 Tidak memberikan notulensi rapat kepada pemegang saham
 Pemegang saham tidak memperoleh gambaran yang akurat, andal, dan mutakhir mengenai informasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Perusahaan memberikan laporan tahunan tepat waktu
 Perusahaan memberikan laporan semesteran tepat waktu
 Perusahaan memberikan laporan kuartalan tepat waktu
 Perusahaan memberikan notulensi rapat kepada pemegang saham
 Pemegang saham memperoleh gambaran yang akurat, andal, dan mutakhir mengenai informasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan

Perlakuan Yang Setara Terhadap Seluruh Pemegang Saham

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Tidak ada pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham mengenai transaksi saham oleh orang dalam												Pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham mengenai transaksi saham oleh orang dalam disampaikan kurang dari 2 hari
Tidak ada pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham mengenai transaksi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa												Pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham mengenai transaksi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa disampaikan kurang dari 2 hari
Pemegang saham tidak diberikan hak untuk mengusulkan agenda RUPS												Pemegang saham diberikan hak untuk mengusulkan agenda
Perusahaan menganggap pemegang saham minoritas sebagai pemegang saham sisa yang tidak mempunyai peran dalam perusahaan, selain itu dianggap lebih banyak menimbulkan masalah dibandingkan keuntungan perusahaan												Perusahaan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas
Perusahaan hanya mendengarkan pendapat pemegang saham minoritas tanpa ada tindak lanjut												Perusahaan memberikan kesempatan penuh menerima mencatat serta menjadikan pendapat pemegang saham minoritas sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan

Peran Stakeholders Dalam Tata Kelola Perusahaan

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Karyawan tidak diberikan kesempatan untuk membicarakan masa depan pekerjaannya dengan manajemen, manajemen tidak menyediakan sarana menampung aspirasi dari karyawan												Karyawan diberikan kesempatan untuk membicarakan masa depan pekerjaannya dengan manajemen, dan manajemen menyediakan sarana untuk menampung aspirasi dari karyawan
Perusahaan tidak mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan karyawan												Perusahaan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan karyawan dan merupakan tanggung jawab perusahaan
Belum ada program pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan												Pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan sudah terjadwal dengan jelas
Tidak ada kebijakan secara eksplisit tentang keadilan dalam memperlakukan karyawan												Ada kebijakan secara eksplisit tentang keadilan dalam memperlakukan karyawan
Etika kerja/etika bisnis belum dibuat												Etika kerja/etika bisnis telah dibuat serta disebarluaskan serta dilakukan evaluasi dalam penerapannya
Perusahaan melebih-lebihkan keunggulan produk dan menutupi informasi yang seharusnya menjadi hak konsumen												Perusahaan tidak melebih-lebihkan keunggulan produk dan memberikan informasi yang menjadi hak konsumen
Perusahaan mengeluarkan kebijakan tidak menerima keluhan dan klaim setelah produk dibeli												Perusahaan menerima keluhan dan klaim dari konsumen, menindaklanjuti dan berupaya memperbaiki produk

Peru:
men
infor
diskus
m

Peru
mer
pelak
dida

Peru
me
membe

sah
kor
ke
Peru
me

membe
tenta
sah
kor

kel
per
Peru
meng
pe

perang
Di
d

m
kepemi
dan/at
y;
peru

Peru
me
membe

tenta
sahar
oleh de
dan d

Perusahaan melakukan pengikatan jaminan berkali-kali terhadap pihak yang menjadi sumber pembiayaan, nilai kewajiban melebihi dari nilai jaminan yang diberikan

Perusahaan telah memiliki aturan yang melindungi dari perilaku anggota yang mengutamakan kepentingan pribadi

Perusahaan belum memiliki program pengembangan komunitas dengan pihak-pihak terkait

Perusahaan belum memiliki program pengendalian aspek dan dampak penting lingkungan hidup

Perusahaan hanya melakukan pengikatan jaminan satu kali terhadap pihak yang menjadi sumber pembiayaan, nilai kewajiban lebih rendah dari nilai jaminan yang diberikan

Perusahaan telah memiliki aturan yang melindungi dari perilaku anggota yang mengutamakan kepentingan pribadi

Perusahaan memiliki program pengembangan komunitas dengan pihak-pihak terkait

Perusahaan memiliki program pengendalian aspek dan dampak penting lingkungan hidup

Pengungkapan Dan Transparansi

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Perusahaan tidak mencantumkan struktur kualifikasi maupun proses Seleksi dewan komisaris dan direksi didalam laporan tahunan											
Perusahaan tidak mencantumkan kebijakan remunerasi dan jumlah balas jasa dewan komisaris dan direksi											
Perusahaan tidak mencantumkan resiko usaha didalam laporan tahunan											

Perusahaan telah mencantumkan struktur kualifikasi maupun proses

Anggota dewan komisaris dan direksi dilaporan tahunan

Perusahaan telah mendiskripsikan kebijakan remunerasi dan jumlah balas jasa dewan komisaris dan direksi

Perusahaan mencantumkan resiko usaha didalam laporan tahunan didalam bagian yang tersendiri

Keanggotaan komite audit kurang dari 3 orang, ketua bukan berasal dari komisaris independen, anggota komite perusahaan berasal dari dalam perusahaan											Keanggotaan komite audit sebanyak 3 orang atau lebih, ketua komite audit juga anggota komisaris independen, anggota komisaris audit berasal dari eksternal yang berkompeten di bidangnya
Komite audit tidak pernah mengadakan rapat dengan perusahaan											Komite audit mengadakan rapat dengan perusahaan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan
Tidak pernah ada rapat komite audit yang terjadwal sebelumnya, tidak ada agenda yang jelas, tidak pernah dibuat notulen											Sudah ada jadwal rapat komite audit berkala, penyampaian agenda sebelum rapat sebelum dimulai agar bisa dipelajari, notulen sudah dibuat serta didistribusikan dengan baik termasuk kepada yang tidak hadir
Komite audit tidak pernah melakukan koordinasi dengan auditor internal											Komite audit melakukan kerjasama dan koordinasi dengan auditor internal yang terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu
Komite audit tidak pernah melakukan koordinasi dengan auditor eksternal											Komite audit melakukan kerjasama dan koordinasi dengan auditor eksternal yang terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu
Komite audit tidak pernah mengadakan telaah-telaah terhadap keadaan dan kinerja perusahaan sehingga tidak mempunyai informasi yang cukup untuk dibicarakan dalam rapat bersama											Komite audit melakukan telaah terhadap keadaan dan kinerja perusahaan, secara aktif memberikan saran, rekomendasi dan/atau perbaikan

Komite audit tidak pernah memberikan pendapat kepada dewan komisaris										Komite audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan dan identifikasi hal-hal tertentu
Kehadiran anggota komite audit dalam rapat kurang dari 25%										Kehadiran anggota komite audit dalam rapat 100%
Perusahaan tidak memiliki komite Remunerasi										Komite Remunerasi telah menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi dewan komisaris dan dewan direksi di perusahaan
Perusahaan tidak memiliki komite Nominasi										Komite nominasi telah menyusun sistem dan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi dewan komisaris, direksi dan eksekutif
Perusahaan tidak memiliki Komite risiko										Komite risiko telah melaksanakan tanggung jawab dan memperhatikan semua risiko untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi aset perusahaan
Dewan komisaris tidak memiliki tanggung jawab pribadi dalam menjalankan fungsi dan tugas/bersifat kolektif										Dewan Komisaris bersungguh-sungguh serta memiliki tanggung jawab pribadi dalam menjalankan fungsi dan tugas

Dewan direksi mengandalkan hubungan pribadi antar anggota direksi dalam menjalankan fungsi dan tugas/bersifat collegial											Semua anggota dewan direksi bekerja secara profesional dan terdiri dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya
Direksi melakukan semua cara untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tidak mempedulikan kinerja perusahaan tidak pernah mengadakan evaluasi kemajuan perusahaan											Direksi berpihak terhadap kepentingan pemegang saham tanpa mengenyampingkan pihak-pihak terkait lainnya, melakukan evaluasi kinerja perusahaan, menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi serta mengambil tindakan perbaikan untuk kemajuan perusahaan
Direksi tidak menjalankan tugas dan fungsi seperti tercantum dalam anggaran dasar dan/atau panduan khusus											Direksi menjalankan tugas dan fungsi seperti tercantum dalam anggaran dasar dan/atau panduan khusus
Anggota direksi diberikan sebagai penghargaan kepada individu tertentu tanpa memperhatikan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki											Pemilihan Anggota direksi sudah dilaksanakan dengan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan serta mempertimbangkan kompetensi, jejaring dan kredibilitas
Dewan Komisaris tidak memberikan kontribusi apapun terhadap perusahaan, hanya menambah pos pengeluaran											Dewan komisaris memberikan kontribusi yang sepadan terhadap balas jasa yang diberikan

2. Data Penelitian

Rekap Data Penelitian

		Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan													
No	Jabatan	Umur	JenKel	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Total	Rata-rata
1	Direktur	45	Laki-laki	90	80	90	90	100	80	90	80	90	100	890	89.00
2	Presiden K	51	Laki-laki	90	100	90	100	100	90	90	80	90	100	930	93.00
3	Supervisor	33	Laki-laki	70	70	70	80	70	70	70	70	70	80	720	72.00
4	Supervisor	27	Laki-laki	100	100	100	100	100	90	90	90	90	100	960	96.00
5	Manajer Ke	39	Laki-laki	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500	50.00
6	Supervisor	28	Perempuan	80	70	70	70	60	70	70	60	70	70	690	69.00
7	Supervisor	39	Laki-laki	60	60	70	80	70	80	80	80	70	70	710	71.00
8	Komisaris	41	Laki-laki	90	80	70	90	70	70	50	50	70	50	690	69.00
9	Manajer	29	Laki-laki	70	80	90	90	100	80	80	70	80	90	830	83.00

Hak pemegang saham						
P1	P2	P3	P4	P5	Total	Rata-rata
100	100	100	100	100	500	100.00
100	100	100	100	90	490	98.00
80	90	100	80	90	440	88.00
80	90	100	80	90	440	88.00
50	50	50	50	50	250	50.00
90	80	90	100	90	450	90.00
70	60	60	80	90	360	72.00
90	70	70	90	80	400	80.00
90	90	90	90	90	450	90.00

Perlakuan Setara terhadap seluruh pemegang saham						
P1	P2	P3	P4	P5	Total	Rata-rata
80	80	100	100	100	460	92.00
90	100	100	100	100	490	98.00
80	80	90	90	80	420	84.00
80	80	90	90	80	420	84.00
50	50	50	50	50	250	50.00
90	90	100	90	90	460	92.00
80	80	80	90	90	420	84.00
80	60	80	80	80	380	76.00

Perusahaan tidak mencantumkan informasi tentang diskusi dan analisis manajemen											Perusahaan mencantumkan diskusi dan analisis manajemen mengenai tinjauan umum perusahaan, tinjauan operasi, tinjauan keuangan, investasi untuk kinerja dimasa depan dan lainnya
Perusahaan tidak mencantumkan pelaksanaan GCG didalam laporan tahunan											Perusahaan mencantumkan pelaksanaan GCG didalam laporan tahunan dibagian tersendiri
Perusahaan tidak merasa perlu memberikan informasi tentang pemilikan saham dewan komisaris dan keluarganya											Perusahaan merasa berkewajiban untuk mengungkapkan informasi tentang pemilikan saham dewan komisaris dan keluarganya
Perusahaan tidak merasa perlu memberikan informasi tentang pemilikan saham dewan komisaris dan keluarganya di perusahaan lain											Perusahaan merasa berkewajiban untuk mengungkapkan informasi tentang pemilikan saham dewan komisaris dan keluarganya di perusahaan lain
Perusahaan tidak mengatur mengenai pembatasan perangkapan jabatan											Perusahaan memiliki peraturan tertulis yang membatasi perangkapan jabatan
Direksi tidak diwajibkan melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang ada di perusahaan lain											Direksi diwajibkan melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang ada di perusahaan lain dengan memberikan pernyataan tertulis
Perusahaan tidak merasa perlu memberikan informasi tentang transaksi saham perusahaan oleh dewan komisaris dan dewan direksi											Perusahaan berkewajiban memberikan informasi tentang transaksi saham perusahaan oleh dewan komisaris dan dewan direksi

Peran Stakeholder dalam Tata Kelola Perusahaan													
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	Total	Rata-rata	
100	100	90	90	90	90	100	90	90	100	100	1040	94.55	
100	80	100	100	100	100	90	90	90	100	100	1050	95.45	
80	80	80	80	90	90	90	90	90	80	80	930	84.55	
80	80	90	90	80	100	90	90	90	90	90	970	88.18	
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	50.00	
80	80	70	80	60	80	80	70	80	70	60	810	73.64	
80	90	70	70	70	90	90	70	70	70	70	840	76.36	
70	90	80	80	80	90	90	80	70	70	90	890	80.91	
90	90	70	90	90	90	100	90	80	80	90	960	87.27	

Pengungkapan dan Transparasi																			
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	Total	Rata-rata
100	100	100	100	100	80	100	100	100	80	100	90	90	0	70	70	70	70	1520	90.67
100	100	100	90	90	90	90	90	80	100	80	100	40	80	80	80	80	50	1520	90.00
80	80	80	80	70	90	90	90	90	90	90	80	90	80	80	70	80	80	1460	80.67
80	80	80	80	80	80	80	70	90	70	90	90	90	0	90	80	80	60	1370	81.33
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	890	50.00
60	100	80	90	70	80	80	60	80	60	70	70	60	50	70	70	70	80	1300	74.00
70	80	70	80	70	70	90	10	60	20	80	50	50	80	60	50	50	70	1120	61.33
80	80	70	70	70	50	30	30	70	20	80	50	50	80	0	60	50	50	990	57.33
90	90	90	90	90	80	90	90	90	80	90	80	80	80	0	70	70	50	1390	84.00

Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi																			
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	Total	Rata-rata
90	80	70	70	80	90	70	80	80	80	70	80	100	80	90	90	90	90	1490	83.13
90	80	70	60	60	60	70	70	50	80	70	70	70	100	90	90	90	90	1380	75.63
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1440	80.00
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1440	80.00
40	40	50	50	40	40	50	50	50	50	40	40	40	40	50	50	50	50	830	45.63
70	70	70	80	70	70	80	70	90	90	80	80	80	80	70	80	70	80	1380	76.25
50	50	50	60	60	60	60	60	50	80	60	60	60	70	90	60	80	80	1150	61.25
60	50	50	60	60	60	60	60	50	80	60	60	60	60	90	70	90	80	1170	62.50
60	80	70	60	80	80	50	70	70	30	80	80	90	70	80	80	80	70	1280	73.13

3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas

Correlations

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Total
P1	Pearson Correlation	1	.888**	.758*	.803**	.647	.685*	.474	.546	.806**	.555	.779*
	Sig. (2-tailed)	.	.001	.018	.009	.059	.042	.198	.128	.009	.121	.013
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P2	Pearson Correlation	.888**	1	.884**	.906**	.829**	.833**	.632	.700*	.886**	.731*	.904**
	Sig. (2-tailed)	.001	.	.002	.001	.006	.005	.068	.036	.001	.025	.001
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P3	Pearson Correlation	.758*	.884**	1	.893**	.959**	.913**	.849**	.866**	.966**	.898**	.982**
	Sig. (2-tailed)	.018	.002	.	.001	.000	.001	.004	.003	.000	.001	.000
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P4	Pearson Correlation	.803**	.906**	.893**	1	.870**	.917**	.680*	.715*	.909**	.715*	.914**
	Sig. (2-tailed)	.009	.001	.001	.	.002	.001	.044	.030	.001	.030	.001
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P5	Pearson Correlation	.647	.829**	.959**	.870**	1	.860**	.826**	.825**	.937**	.894**	.948**
	Sig. (2-tailed)	.059	.006	.000	.002	.	.003	.006	.006	.000	.001	.000
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P6	Pearson Correlation	.685*	.833**	.913**	.917**	.860**	1	.876**	.857**	.927**	.826**	.943**
	Sig. (2-tailed)	.042	.005	.001	.001	.003	.	.002	.003	.000	.006	.000
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P7	Pearson Correlation	.474	.632	.849**	.680*	.826**	.876**	1	.948**	.871**	.948**	.883**
	Sig. (2-tailed)	.198	.068	.004	.044	.006	.002	.	.000	.002	.000	.002
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P8	Pearson Correlation	.546	.700*	.866**	.715*	.825**	.857**	.948**	1	.863**	.944**	.900**
	Sig. (2-tailed)	.128	.036	.003	.030	.006	.003	.000	.	.003	.000	.001
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P9	Pearson Correlation	.806**	.886**	.966**	.909**	.937**	.927**	.871**	.863**	1	.904**	.990**
	Sig. (2-tailed)	.009	.001	.000	.001	.000	.000	.002	.003	.	.001	.000
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P10	Pearson Correlation	.555	.731*	.898**	.715*	.894**	.826**	.948**	.944**	.904**	1	.922**
	Sig. (2-tailed)	.121	.025	.001	.030	.001	.006	.000	.000	.001	.	.000
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Total	Pearson Correlation	.779*	.904**	.982**	.914**	.948**	.943**	.883**	.900**	.990**	.922**	1
	Sig. (2-tailed)	.013	.001	.000	.001	.000	.000	.002	.001	.000	.000	.
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.852**	.926**	.905**	.883**	.950**
	Sig. (2-tailed)	.	.004	.000	.001	.002	.000
	N	9	9	9	9	9	9
P2	Pearson Correlation	.852**	1	.872**	.863**	.832**	.924**
	Sig. (2-tailed)	.004	.	.002	.003	.005	.000
	N	9	9	9	9	9	9
P3	Pearson Correlation	.926**	.872**	1	.949**	.908**	.973**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.	.000	.001	.000
	N	9	9	9	9	9	9
P4	Pearson Correlation	.905**	.863**	.949**	1	.957**	.978**
	Sig. (2-tailed)	.001	.003	.000	.	.000	.000
	N	9	9	9	9	9	9
P5	Pearson Correlation	.883**	.832**	.908**	.957**	1	.959**
	Sig. (2-tailed)	.002	.005	.001	.000	.	.000
	N	9	9	9	9	9	9
Total	Pearson Correlation	.950**	.924**	.973**	.978**	.959**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	9	9	9	9	9	9

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	Total
P1	Pearson Correlation	1	.745*	.781*	.890**	.811**	.777*	.832**	.805**	.841**	.912**	.779*	.912**
	Sig. (2-tailed)	.	.021	.013	.001	.008	.014	.005	.009	.004	.001	.013	.001
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P2	Pearson Correlation	.745*	1	.572	.665	.623	.757*	.936**	.697*	.606	.623	.700*	.785*
	Sig. (2-tailed)	.021	.	.108	.051	.073	.018	.000	.037	.084	.073	.036	.012
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P3	Pearson Correlation	.781*	.572	1	.884**	.824**	.863**	.694*	.835**	.852**	.928**	.872**	.907**
	Sig. (2-tailed)	.013	.108	.	.002	.006	.003	.038	.005	.004	.000	.002	.001
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P4	Pearson Correlation	.890**	.665	.884**	1	.858**	.879**	.822**	.912**	.890**	.911**	.873**	.953**
	Sig. (2-tailed)	.001	.051	.002	.	.003	.002	.007	.001	.001	.001	.002	.000
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P5	Pearson Correlation	.811**	.623	.824**	.858**	1	.808**	.808**	.930**	.788*	.856**	.926**	.921**
	Sig. (2-tailed)	.008	.073	.006	.003	.	.008	.008	.000	.012	.003	.000	.000
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P6	Pearson Correlation	.777*	.757*	.863**	.879**	.808**	1	.889**	.884**	.835**	.808**	.819**	.925**
	Sig. (2-tailed)	.014	.018	.003	.002	.008	.	.001	.002	.005	.008	.007	.000
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P7	Pearson Correlation	.832**	.936**	.694*	.822**	.808**	.889**	1	.884**	.774*	.756*	.819**	.914**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.038	.007	.008	.001	.	.002	.014	.018	.007	.001
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P8	Pearson Correlation	.805**	.697*	.835**	.912**	.930**	.884**	.884**	1	.907**	.875**	.902**	.958**
	Sig. (2-tailed)	.009	.037	.005	.001	.000	.002	.002	.	.001	.002	.001	.000
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P9	Pearson Correlation	.841**	.606	.852**	.890**	.788*	.835**	.774*	.907**	1	.901**	.733*	.905**
	Sig. (2-tailed)	.004	.084	.004	.001	.012	.005	.014	.001	.	.001	.025	.001
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P10	Pearson Correlation	.912**	.623	.928**	.911**	.856**	.808**	.756*	.875**	.901**	1	.882**	.942**
	Sig. (2-tailed)	.001	.073	.000	.001	.003	.008	.018	.002	.001	.	.002	.000
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
P11	Pearson Correlation	.779*	.700*	.872**	.873**	.926**	.819**	.819**	.902**	.733*	.882**	1	.929**
	Sig. (2-tailed)	.013	.036	.002	.002	.000	.007	.007	.001	.025	.002	.	.000
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Total	Pearson Correlation	.912**	.785*	.907**	.953**	.921**	.925**	.914**	.958**	.905**	.942**	.929**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.012	.001	.000	.000	.000	.001	.000	.001	.000	.000	.
	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliabilitas

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	9	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	9	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.975	10

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	9	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	9	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.952	5

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	9	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	9	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.975	5

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	9	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	9	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.980	11

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	9	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	9	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.963	15

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	9	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	9	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.974	16

4. T-Test Table

T-Test**One-Sample Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Komitmen tata kelola perusahaan	9	76.8889	14.64108	4.88036

One-Sample Test

	Test Value = 70					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Komitmen tata kelola perusahaan	1.412	8	.196	6.88889	-4.3652	18.1430

T-Test**One-Sample Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Hak pemegang saham	9	84.0000	15.29706	5.09902

One-Sample Test

	Test Value = 70					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Hak pemegang saham	2.746	8	.025	14.00000	2.2416	25.7584

T-Test**One-Sample Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Perlakuan setara terhadap pemegang saham	9	82.8889	13.86042	4.62014

One-Sample Test

	Test Value = 70					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Perlakuan setara terhadap pemegang saham	2.790	8	.024	12.88889	2.2348	23.5429

T-Test**One-Sample Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Peran Stakeholder	9	81.2122	13.83914	4.61305

One-Sample Test

	Test Value = 70					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Peran Stakeholder	2.431	8	.041	11.21222	.5745	21.8499

T-Test

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pengungkapan dan Transparasi	9	74.3700	14.77029	4.92343

One-Sample Test

	Test Value = 70					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Pengungkapan dan Transparasi	.888	8	.401	4.37000	-6.9835	15.7235

T-Test

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi	9	70.8356	12.11084	4.03695

One-Sample Test

	Test Value = 70					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi	.207	8	.841	.83556	-8.4737	10.1448

Correlations

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Total
P1	Pearson Correlation	1	.837**	.759*	.961**	.796*	.941**
	Sig. (2-tailed)	.	.005	.018	.000	.010	.000
	N	9	9	9	9	9	9
P2	Pearson Correlation	.837**	1	.968**	.733*	.769*	.945**
	Sig. (2-tailed)	.005	.	.000	.025	.016	.000
	N	9	9	9	9	9	9
P3	Pearson Correlation	.759*	.968**	1	.679*	.758*	.917**
	Sig. (2-tailed)	.018	.000	.	.044	.018	.001
	N	9	9	9	9	9	9
P4	Pearson Correlation	.961**	.733*	.679*	1	.840**	.905**
	Sig. (2-tailed)	.000	.025	.044	.	.005	.001
	N	9	9	9	9	9	9
P5	Pearson Correlation	.796*	.769*	.758*	.840**	1	.895**
	Sig. (2-tailed)	.010	.016	.018	.005	.	.001
	N	9	9	9	9	9	9
Total	Pearson Correlation	.941**	.945**	.917**	.905**	.895**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.001	.001	.
	N	9	9	9	9	9	9

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).